

ABSTRACT

THE NEUTRALITY OF BUREAUCRACY IN LOCAL ELECTIONS OF WAY KANAN REGENCY YEARS 2015

By:

WINDA DWIASTUTI HERMAN

The execution of Local Election in Way Kanan Regency has been indicated to the case of violent of the bureaucratic neutrality. Bureaucracy as public servant should be focus on the unbound public service by political interest and political elite. These laws have been violated by the reality of many bureaucracies involved in Way Kanan politicization, such as engaging in political campaigns and community mobilization to support one candidate of the Regent.

Furthermore, this research was aimed to analyze some factors that cause the bureaucracy were not neutral. The using method of this research is qualitative method. Researcher do some data collection by interviewed and documentation. Interviews have been conducted on seven informants consisted of the bureaucracy in the Department of Education, three bureaucrats in the Department of Public Works, and the Chairman of the Indonesian Journalists Association Way Kanan Regency.

The result of this research generated five main points of some factors that cause the bureaucracy were not neutral, which has suitability to Hollyson theory, such as the strength of patron-client culture, motivation to take office, a kinship, the polarization of political elites and intervention of political parties. In addition, emerged new finding about the presence of punishment vote, that requires the bureaucrats shift in favor of another candidate on the basis of disappointment with the incumbent's performance during a single period in office.

Based on it, researcher assumes that to maintain the bureaucrat neutrality is needed political office and governmental office separations. Governmental office have to based on merit system and regional head should not be an official builder in local level to avoid the politicization of local civil servant.

Key word: Neutrality, Bureaucracy, Regional Election

ABSTRAK

NETRALITAS BIROKRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015

OLEH

WINDA DWIASTUTI HERMAN

Pelaksanaan pilkada Kabupaten Way Kanan terindikasi kasus pelanggaran netralitas oleh birokrasi. Birokrasi sebagai Abdi Negara seharusnya berfokus pada *public service* yang tidak terikat oleh kepentingan politik maupun elit politik. Aturan hukum tersebut terlanggar dengan realita ada kecenderungan birokrasi di Way Kanan terlibat politisasi seperti: terlibat kampanye politik, mobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab birokrasi bersikap tidak netral. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan metode pengumpulan data penelitian dengan sistem wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara langsung telah dilakukan terhadap tujuh informan terdiri dari birokrasi di Dinas Pendidikan, birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Way Kanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima faktor penyebab birokrasi tidak netral yang memiliki kesesuaian dengan pemikiran Hollyson yaitu kuatnya budaya *patron-client*, motivasi meraih jabatan, hubungan kekerabatan, politisasi elit politik dan intervensi partai politik. Muncul hasil temuan baru yaitu adanya *punishment vote* yang menuntut birokrasi beralih mendukung calon lain atas dasar kekecewaan terhadap kinerja *incumbent* selama satu periode menjabat.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa untuk menjaga netralitas birokrasi dibutuhkan adanya pemisahan antara jabatan politik dan jabatan pemerintahan. Jabatan pemerintahan harus berdasarkan *meryt system* dan Kepala Daerah seharusnya tidak menjadi Pembina kepegawaian tingkat daerah untuk menghindari politisasi terhadap pegawai daerah.

Kata kunci: Netralitas, Birokrasi, Pilkada.